

**EFEKTIVITAS KINERJA PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU
(RPP) DALAM MEMBANGUN TINGKAT PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 KOTA MAKASSAR***PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF ELECTION SMART HOME PROGRAM
(RPP) IN BUILDING LEVEL OF PUBLIC POLITICAL EDUCATION IN
THE 2020 ELECTIONS IN MAKASSAR CITY***Pertiwi Utami Ridwan¹, Denesha Putri Patricia Naseer², Juwandi Panab³**¹Universitas Hasanuddin^{2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Email: pertiwiutamiridwan@gmail.com

deneshaptr@gmail.com

wandi23panab@gmail.com

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, dan memiliki tugas untuk terus meningkatkan pendidikan politik di masyarakat. Maka dari itu diperlukan inovasi dari KPU agar dapat menarik perhatian dari masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar yang menjalankan program Rumah Pintar Pemilu dalam membangun tingkat pendidikan politik masyarakat pada pilkada 2020 Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kinerja program RPP dan kinerja program RPP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori efektivitas program menurut Budiani dalam Hermawan (2018) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui ukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan melihat ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan, program RPP (Rumah Pintar Pemilu) sudah berjalan akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang program RPP dengan baik, program RPP belum efektif karena pengadaan pembangunan untuk Rumah Pintar Pemilu belum terlaksana sehingga ketika masyarakat berkunjung ke KPU Kota Makassar tidak bisa menikmati secara langsung salah satu program RPP yang didalamnya terdapat pembelajaran mengenai pemilihan umum yang dapat dipraktikan secara langsung.

Kata kunci : *Program Rumah Pintar Pemilu, Pendidikan Politik, Efektivitas.***ABSTRACT**

The General Election Commission is an institution that organizes General Elections, and has the task of continuously improving political education in the community. Therefore, innovation from the KPU is needed in order to attract the attention of the public. Like what the Makassar City KPU did, which ran the Election Smart House program in building the level of public political education in the 2020 Makassar City election. This study aims to determine and analyze the effectiveness of the performance of the RPP program and the performance of the RPP program in increasing public participation through political education. The theory used in this paper is the theory of program effectiveness according to Budiani in Hermawan (2018) which states that to determine the size of the effectiveness of a program, it can be done by looking at the accuracy of program targets, program socialization, achievement of program goals, and program monitoring. By using qualitative analysis methods and data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of the writing carried out, the RPP (Rumah Pintar Pemilu) program

has been running but there are still many people who still do not know about the RPP program properly, the RPP program has not been effective because the procurement of development for the Election Smart House has not been implemented so that when people visit the City KPU Makassar cannot visually enjoy one of the RPP programs in which there are lessons about general elections that can be practiced directly.

Keywords: *Election Smart House, Political Education, Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu adalah sebuah upaya membangun demokrasi dan pemerintah harus mampu memfasilitasi kegiatan tersebut. Demikian pula dengan tujuan agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu ini menjadi sempurna, jujur, dapat di mengerti, dan terbebas dari berbagai jenis hal yang tidak di inginkan seperti penghalang dari pihak manapun maka didirikanlah lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau akrab disebut dengan Pemilukada atau Pilkada merupakan gambaran dari pemerintahan yang menganut politik demokrasi, di Indonesia pemilihan kepala daerah serentak digelar pada tahun 2020 khusus untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan habis di tahun 2021.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2020 membawa dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah. Pilkada Makassar 2020 yang biasa juga disebut sebagai pemilihan umum Walikota Makassar 2020 adalah penyelenggaraan pemilihan untuk memilih Walikota Dan Wakil Walikota Makassar periode 2021-2024. Pemilihan ini dilakukan dikarenakan pada tahun 2018 kotak kosong menang atas pasangan Appi-Cicu sehingga pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan pada tahun 2019 karena akan dilangsungkan juga pemilihan umum atau pemilu legislatif (presiden, wakil presiden, anggota DPR dan DPD).

Pada tanggal 9 Desember 2020, komisi pemilihan umum (KPU) kota Makassar menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah khususnya dalam pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Makassar yang tertunda dengan beberapa calon pasangan atau kandidat. Beberapa kandidat terkuat berasal dari kalangan birokrat yaitu pasangan calon Irman Yasin Limpo ada juga yang berasal dari kalangan politisi yaitu Danny Pomanto yang dahulu juga menjabat sebagai Walikota Makassar periode (2013-2018), Syamsu Rizal yang dulu menjabat sebagai Wakil Walikota Kota Makassar periode (2013-2018), dan selain itu ada juga yang berasal dari tokoh masyarakat dan kalangan profesional yaitu Munarfi Arifuddin adalah CEO PSM Makassar dan Fadli Ananda adalah seorang Dokter dan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda.

Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui komisi pemilihan umum”. Penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas dari para pemilihnya, diukur melalui partisipasi politiknya.

Partisipasi Politik merupakan kesadaran politik masyarakat yang menjadi faktor yang sangat penting, dengan terbentuknya kesadaran akan hak dan kewajiban serta hubungan pengetahuan yang dikaitkan dengan lingkungan masyarakat. Sehingga keterlibatan dalam partisipasi politik dapat di ukur melalui kegiatan politik tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat juga dapat di ukur

melalui pendidikan politik dari masyarakat yang akan mengikuti pemilihan umum.

Dari sekian banyak hal yang mempengaruhi tingkat keterbukaan wawasan masyarakat mengenai politik dan sekaligus menentukan partisipasi melalui pemilihan adalah dengan cara masyarakat diedukasi untuk menjadi pemilih yang cerdas. Maka dari itu intensifitas dan efektivitas dari proses pendidikan politik sangat di perlukan agar dapat memenuhi tingkat kualitas pemilih sekaligus dalam kehidupan berdemokrasi Menurut Al Rafni dan Suryanef dalam Al Rafni (2019).

Menurut Website KPU Kota Makassar (2021) pada Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini pemilihan Walikota Makassar di tahun 2020 masih saja ada kecamatan yang berada di Kota Makassar yang minim atau rendah partisipasi. Hal itu menandakan bahwa program Rumah Pintar Pemilu belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi permasalahan pendidikan politik dalam penyelenggaraan Pilkada serta partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota Makassar pada tahun 2020, dapat dilihat dari postingan berita di website Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang menyatakan ada 10 kelurahan dengan partisipasi terendah.



Gambar 1.1

Kelurahan Dengan Partisipasi Terendah

Sumber: website KPU Kota Makassar, 2020

Pada pemilihan Walikota Makassar 2020, KPU kota Makassar menargetkan partisipasi

masyarakat akan mencapai di angka 77,5% akan tetapi pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Wali kota Makassar pada tahun 2020 kemarin hanya mencapai 59,6% saja. Dilansir dari media massa *Makassar Sindo News* bahwa tingkat partisipasi pemilu masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Makassar adalah yang paling rendah di antara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan (Sanusi, 2020).

Terjadinya tidak ketercapaian target yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ini tidak terlepas dari efektivitas pada peningkatan pendidikan politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendidikan politik masyarakat merupakan indikator yang sangat perlu untuk di perhatikan karena merupakan sebuah langkah awal untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan seseorang mengenai langkah awal serta proses pemilihan umum sekaligus meningkatkan kualitas pemilih agar menjadi pemilih yang cerdas. Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul

“EFEKTIVITAS KINERJA PROGRAM RPP (RUMAH PINTAR PEMILU) DALAM MEMBANGUN TINGKAT PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 KOTA MAKASSAR.”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas program Rumah Pintar Pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Pendidikan politik?
2. Bagaimana kinerja Rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Pendidikan politik?

Melalui penulisan karya ilmiah ini penulis mengkaji dan mencari informasi yang bersumber dari peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, agar dapat melihat

kelebihan dan kekurangan yang ada pada penelitian sebelumnya. Selain itu penulis juga ingin mengkaji informasi dari beberapa jurnal dan skripsi dalam rangka mendapatkan teori yang memiliki kaitan dengan judul yang di gunakan sebagai acuan:

1. Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Dewi (2021) yang membahas tentang “Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dan Kepemiluan Di KPU Kabupaten Banyumas Prespektif Masalah Mursalah”. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan mengenai konsep rumah pintar Pemilu sebagai sebuah konsep pendidikan untuk pemilih serta untuk memberitahukan mengenai peran Rumah Pintar Pemilu yang di gunakan untuk memenuhi sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas melalui Prespektif Masalah Mursalah, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Pintar Pemilu yang berada di bawah Naungan KPU mempunyai peran yang menjadi sarana pendidikan politik dan kepemiluan karena fasilitas materi dan sumber daya manusia yang dapat tercukupi.
2. Setelah itu penelitian kedua berbentuk jurnal yang di lakukan oleh Zega, dkk (2019) yang membahas mengenai “Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan“. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat apakah program Rumah Pintar Pemilu mempunyai pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat studi kasus komisi pemilihan umum kota medan. Dikarenakan hadirnya Rumah Pintar Pemilu di medan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Medan.

Efektivitas

Efektif adalah kata yang berasal dari bahasa inggris *effective* yang memiliki arti berhasil, atau suatu hal yang dilakukan dengan baik dan berhasil. Kata efektif merupakan dasar nya, sementara kata sifatnya adalah efektivitas. Sebagaimana yang di maksud oleh Effendy dalam Nashar (2020, hal. 9) efektivitas adalah sebagai berikut: “komunikasi yang prosesnya mencapi tujuan yang di rencanakan sesuai dengan biaya yang di anggarkan, waktu yang di tetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” Mengenai efektivitas didefinisikan melalui kamus ilmiah yang sudah terkenal sebagai hasil guna, ketepatan guna atau hal yang menunjang tujuan. Sedangkan menurut Miller dalam Tangkilisan (2005, hal. 138), mengemukakan bahwa: “*Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve is goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency is mainly concerned with goal attainments.*” Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.

Efektivitas diaplikasikan untuk menilai sejauh mana suatu program yang sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Sedarmayanti dalam Hermawan dan Dedy (2018), efektivitas adalah mengenai suatu ukuran yang menyajikan gambaran seberapa dalam mencapai target. Suatu program dapat dikatakan berhasil tidak semata-mata melalui pertimbangan sasaran organisasi atau instansi akan tetapi menyangkut mekanisme untuk mempertahankan diri dan mencapai sasaran.

Efektivitas Program

Dapat diketahui bahwa efektifitas dari sebuah program bisa dilihat dari membandingkan hal yang ingin dicapai program melalui output dan sasaran dari program tersebut. Efektivitas program adalah mengenai sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan sehingga dapat dirumuskan sebagai sebuah tingkat perwujudan sasaran. Selanjutnya mengenai pendapat dari peserta program dapat digunakan sebagai tingkat pengukuran untuk menentukan efektifitas program (Julia, 2010, hal. 26).

Program Rumah pintar pemilu (RPP)

Rumah pintar pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari sebuah bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktivitas edukasi masyarakat (Biro Teknis dan Hupmas, 2015). Pada bagian lain RPP diaplikasikan untuk menjalankan sebagian besar program pendidikan pemilih, dan menjadi wadah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi, dan ruang diskusi bagi komunitas pegiat pemilu untuk membangun gerakan.

Rumah pintar pemilu dapat difungsikan pada fungsi yang lebih luas menjadi semacam museum pemilu mengenai konsep rumah pintar pemilu penting untuk menjawab apa yang diinginkan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Menurut Biro Teknis dan Hupmas (2015) akan tujuan utama dari pendidikan politik.

Pemilihan Kepala Daerah

Dari gerakan reformasi tahun 1998 Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan sebuah amanah langsung. Dalam

pemilihan pemimpinnya diperlukan partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk terlibat langsung, momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah. Pilkada digunakan tidak saja untuk memenuhi Hasrat mengganti tata kelola lama pemimpin. Pilkada adalah salah satu proses politik yang merupakan penerapan hak mengenai kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk periode 5 tahun kedepan.

Memasuki pengujung tahun 2020, sebagian besar masyarakat mulai memperhatikan mengenai kontestasi politik yaitu pemilihan kepala daerah. Kegiatan pemilihan kepala daerah bersama dengan wakil kepala daerah secara langsung merupakan kegiatan pilkada. Pilkada diberikan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati di tingkat kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk tingkat kota. Pilkada di tahun 2020 ini dinilai sangat berbeda di karenakan diselenggarakan pada masa pandemi *Covid-19* masih belum berakhir. Penyelenggaraan Pilkada 2020 akan digelar secara serentak pada masa pandemi. Menurut (wikipedia) mengenai tahapan pemungutan suara direncanakan akan digelar secara serentak pada Desember 2020. Sekitar 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah tahun 2020 dapat dipaparkan sebagai berikut: 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

METODE

Peneliti ingin menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Kualitatif memiliki metode yang lebih bermacam-macam melalui penelitian akademis dibandingkan dengan metode kuantitatif (Creswell, 2016). Menurut peneliti pendekatan kualitatif adalah untuk menentukan mengenai cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian yang telah ditentukan.

Penulis juga ingin menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran, deskripsi, dan juga lukisan secara sistematis faktual dan terpercaya dari fakta-fakta serta keterkaitan antara fenomena yang dikaji. sebuah penelitian yang memberi suatu hal berupa gambaran yang cermat tentang seseorang atau kelompok tertentu mengenai keadaan dan gejala yang timbul (koentjaraningrat, 1993).

Dengan penjelasan di atas maka dari itu untuk meneliti judul yang ingin di angkat oleh penulis mengenai Efektivitas Kinerja Program RPP (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar, penulis ingin menggunakan pendekatan kualitatif.

Sumber Data

Data sekunder adalah data yang di gunakan dalam menunjang data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 36 dalam catatan, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan data lapangan. Peneliti dalam hal ini hanya sekedar mengakses, meminta data, mencatat data tersebut kepada KPU Kota Makassar sebagai Lembaga yang menangani mengenai Rumah Pintar Pemilu Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari informan yang akurat melalui wawancara juga dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terbuka yang mempunyai hubungan dengan efektivitas dari Program Rumah Pintar Pemilu terhadap pendidikan politik masyarakat mengenai hal ini diharapkan data dan pertanyaan yang telah ada disampaikan secara lengkap.

Informan

Dalam proses memilih informan merupakan salah satu bentuk sumber data yang sangat berpengaruh pada proses penelitian. Pada dasarnya informan, partisipan merupakan sampel dalam penelitian kualitatif, namun bisa di katakan sebagai

sampel teoritis karena hal yang ingin dicapai dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan sebuah teori (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar berada di bagian ujung selatan Pulau Sulawesi yang notabeneanya merupakan sebuah kota internasional dan juga terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan terdapat dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar yaitu di sebelah utara dan timur dengan Kabupaten Maros dan sebelah selatan Kabupaten Gowa serta sebelah barat Selat Makassar. Mengenai Topografi Kota Makassar sendiri merupakan sebuah dataran rendah dengan kemiringan lahan 0-2 (datar) dan kemiringan lahan 3-15 (bergelombang). Tercatat luas wilayah Kota Makassar yaitu 175,77 km persegi. Mengenai kondisi iklim Kota Makassar sendiri memiliki iklim sedang hingga tropis dan memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C hingga 29 °C. Di sepanjang koridor barat dan utara Kota Makassar dekat dengan pantai yang membentang dan juga biasa di sebut "Waterfront City" yang dialiri beberapa sungai di dalamnya yaitu Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang semuanya berakhir di dalam Kota Makassar.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis walaupun dalam masa pandemi *Covid-19* maka dari itu dilakanakan Pilkada pada tahun 2020 kemarin di Kota Makassar. Untuk yang menangani pemilihan umum di Kota Makassar sendiri yaitu pihak Komisi Pemilihan Umum memiliki berbagai macam cara untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di antaranya dengan menggunakan program

yang langsung dicanangkan oleh KPU RI yaitu program yang di buat untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat yang di kenal dengan sebutan Rumah Pintar Pemilu (RPP).

Analisis RPP sebagai program peningkatan pendidikan politik dalam Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang merupakan tugas dari salah satu lembaga negara yaitu KPU. Tupoksi dari KPU dalam pendidikan politik dapat dilihat pada peraturan KPU RI nomor 10 tahun 2018 mengenai sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu.

Sasaran Program Rumah Pintar Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik

Program Rumah Pintar Pemilu merupakan program yang di bentuk oleh KPU RI dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pendidikan politik yang merupakan sebuah konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik dalam rangka menciptakan sebuah sistem politik yang benar-benar stabil, efektif, dan efisien. Program ini sendiri menysasar berbagai khalangan masyarakat akan tetapi yang paling utama adalah pada kelompok pemilih pemula yang kebanyakannya adalah pemuda-pemuda. Menurut hasil dari wawancara Penulis bersama Ibu Endang Sari yang merupakan kepala bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat mengetakan bahwa:

“Untuk program Rumah Pintar Pemilu sendiri merupakan program yang di canangkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umun Republik Indonesia yang merupakan program khusus yang di tugaskan kepada KPU setiap daerah agar program tersebut di bentuk. Untuk sasaran dari program ini sendiri sebenarnya kepada seluruh masyarakat akan tetapi lebih di tekankan kepada masyarakat yang masih baru dalam hal pemilihan umum lebih tepatnya pada kelompok pemilih pemula yang

ilmu mengenai pendidikan politik atau bekal pendidikan politik mereka masih belum terlalu banyak sehingga dengan di bentuknya Rumah Pintar Pemilu membuat pihak KPU dapat lebih mudah dalam menyampaikan hal-hal mengenai pemilihan umum dengan konsep yang lebih simple dan tentunya berdampak baik pada pendidikan politik masyarakat.”

Adalah kelompok berada dalam posisi strategis di karenakan dikarnakan besaran ataupun posisi dalam struktur pemilih.

1) Pra Pemilih

Adalah Warga Negara Indonesia yang usianya belum mencapai 17 tahun atau masih berstatus anak anak maka di kategorikan sebagai kelompok yang belum memasuki usia pemilih, namum dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan memasuki usia pemilih. Di Indonesia sendiri aturan mengenai batasan usia pemilih minimal tuju belas tahun atau telah menikah.

2) Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang baru menggunakan hak pilih nya atau memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kisaran Usia dari pemilih pemula adalah sekitar 17-21 tahun dan rata rata adalah seorang anak Sma kelas 3 dan mahasiswa serta pekerja muda.

3) Perempuan

Pemilih perempuan adalah Warga Indonesia yang sudah masuk usia pemilih atau telah menikah. Ada banyak alasan mengapa pemilih perempuan di jadikan sasaran strategis yang pertama, di karenakan pemilih perempuan mudah untuk di mobilisasi pada saat pemilihan maupun sebelum pemilihan berlangsung. Yang kedua, perempuan sebahagian besar untuk tingkat pendidikannya lebih rendah di bandingkan laki-laki. Yang ketiga, perempuan

lebih mengutamakan peran nya di lingkup nya saja sampai urusan-urusan publik tekadang diabaikan, padahal juga menyangkut kepentingan seorang perempuan.

4) Kelompok Rentan

Kelompok rentan merupakan kelompok masyarakat yang dalam kegiatan pemilu secara berkesinambungan ataupun acak masih memiliki masalah. Secara khusus masalah tersebut dapat terkait dengan partisipasi pemilih hingga dalam kegiatan pemilu. Penyelenggaraan dan legitimasi pemilu dapat terganggu dikarenakan permasalahan tersebut. Kelompok masyarakat ini terbagi dari beberapa klaster, dari. Beberapa klaster tersebut yang paling sering terjadi adalah mengenai partisipasi pemilih rendah.

Partisipasi Pemilih Rendah

Dalam hal ini dapat di katakan rendah dikarenakan Secara konsisten di bawah batas minimal rata rata untuk kategori demokrasi yang Sukses pada pemungutan suara di suatu daerah. Berdasarkan rumusan ekonomis intelligence unit (EIU) Pada negara yang Partisipasi pemilih nya konsisten pada angka 70% Dapat dikatakan adalah negara yang demokrasi nya sukses. Partisipasi pemilih rendah menjadi sasaran pendidikan pemilih karena pada daerah dan kelompok masyarakat yang partisipasinya rendah dapat menggiling Legitimasi dalam pemilihan umum.

Penghitungan suara yang telah disediakan sesuai jumlah pemilih TPS dan kebutuhan pemungutan menjadi sia sia dikarenakan partisipasi rendah sehingga membuat kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tidak efisien dan efektif. Metode pendekatan yang dilakukan dalam memberikan materi ada beberapa cara. Jika di masa pandemi, menggunakan media daring secara virtual melalui sosial media zoom, youtube dan juga instagram. Pemanfaatan media sosial ini

dimaksimalkan di masa pandemi, karena tidak bisa secara masif dimaksimalkan seperti hari-hari sebelum adanya covid-19. Maka dari itu pada saat masa pandemi masyarakat di sajikan berbagai macam pembelajaran RPP lebih banyak menggunakan digitalisasi untuk kalangan muda itu sangat menarik dan sangat baik dalam meningkatkan pendidikan politik akan tetapi bagi sebahagian khalangan masyarakat yang tidak tidak mengerti akan perkembangan yang serba digital membuat digitalisasi yang di lakukan untuk menunjang RPP dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat secara menyeluruh pada masa pandemi tidak dapat terealisasi secara menyeluruh.

Maka dari itu Menurut wawancara Penulis dengan ibu Endang Sari selaku Kabag Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan: Mengenai sosialisasi kepada masyarakat mengenai rumah pintar pemilu sudah di laksanakan oleh pihak kpu akan tetapi RPP ini sendiri di gerakkan pada saat tidak ada tahapan kegiatan pemilu bentuk sosialisasinya sendiri itu kebanyakan pihak KPU melaksanakan nya di lingkup mahasiswa dan siswa SMA dikarenakan untuk Rumah Pintar Pemilu lebih tertuju kepada pemuda-pemuda yang bisa di bilang sebahagian besar masih menganggap pendidikan politik itu tabu atau tidak di perlukan. Dikarenakan covid melanda maka RPP membuat semacam e- RPP agar lebih mudah di akses dan RPP masih bisa berjalan walaupun tidak sepenuhnya maksimal.”

Pencapaian Tujuan Program Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat

Pentingnyadari peran pendidikan kepada pemilih dalam rangka untuk mencapai target dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dimana diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu sebesar 77,5 %. Sebelum RPP dibentuk sebenarnya KPU juga sudah melakukan pendidikan pemilih

yang sifatnya masih berbentuk sosialisasi kepada masyarakat. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh KPU yaitu mensosialisasikan pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung kepada siswa siswi di sekolah masing masing. KPU juga mengunjungi sekolah- sekolah dalam memberikan simulasi tentang tata cara pemilu di hari pencoblosan dan terakhir ada juga pembentukan tim relawan demokrasi. RPP diharapkan mampu memberikan pendidikan pemilih bagi masyarakat dengan secara lebih maksimal untuk tercapainya tujuan dari pendidikan pemilih agar menumbuhkan kesadaran politik masyarakat sejak dini.

Mengenai tujuan dari Rumah Pintar Pemilu sendiri adalah untuk meningkatkan pendidikan politik dari masyarakat dan menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan politik sejak dini itu sangat di perlukan agar kita sebagai masyarakat yang berdemokrasi dan berdaulat tidak buta akan pendidikan mengenai politik. Menurut wawancara Penulis bersama Ketua KPU Kota Makassar Bapak M. Faridl wajdi mengenai pencapaian tujuan dari program Rumah Pintar Pemilu :

“Mengenai pencapaian tujuan dari program RPP sebenarnya sudah terpenuhi hanya saja pemahaman seseorang mengenai literasi politik itu berbeda-beda, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat pada saat pemilu dari tahun ketahun makin membaik sehingga dapat di katakan bahwa pencapaian tujuan dr program RPP masih tergolong baik. Akan tetapi ada saja masyarakat yang belum memahami secara baik bagaimana pendidikan politik itu sangat mempengaruhi partisipasi seseorang dalam pelaksanaan pemilu.”

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Pelaksanaan kegiatan program Rumah Pintar Pemilu sudah berjalan akan tetapi kebanyakan dari masyarakat masih belum mengetahui tentang program RPP dengan baik

bisa di lihat dari partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun belum mencapai target nasional maka dari itu untuk efektivitas dari Program RPP masih terbilang belum baik. Menurut fakta yang penulis dapatkan di lapangan kebanyakan dari masyarakat tidak begitu peduli dengan pendidikan politik yang mereka tahu mengenai pemilihan umum hanyalah kegiatan pemilihan Gubernur, Walikota, Presiden Dan Bupati mengapa di katakan belum efektif secara menyeluruh dikarenakan pengadaan pembangunan untuk Rumah Pintar Pemilu sendiri hingga saat ini belum terlaksana untuk Kota Makassar sehingga ketika masyarakat berkunjung ke KPU Kota Makassar tidak bisa menikmati langsung secara visual salah satu program RPP yang di dalam nya terdapat pembelajaran mengenai pemilihan umum yang dapat di praktekkan secara langsung. Menurut pengamatan peneliti pada penelitian terdahulu permasalahan yang terjadi kebanyakan dikarenakan kurang pedulinya warga mengenai pendidikan pemilih maka dari itu yang dapat peneliti simpulkan bahwa sejak dulu orang-orang hanya menganggap bahwa pemilihan umum merupakan hal yang biasa pemilihan umum hanyalah sekedar pemilhan untuk memilih calon pemimpin sehingga kurang sadarnya masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik. Berdasarkan wawancara Penulis bersama ibu Endang Sari selaku Kepala Bagian Divisi SDM dan partisipasi masyarakat mengatakan bahwa :

“Rumah Pintar Pemilu sampai saat ini masih belum ada ruang visual yang sebenarnya menjadi objek utama bagi masyarakat untuk merasakan praktek pemilihan umum secara langsung maka dari itu ketika masyarakat melakukan kunjungan pembelajaran ke KPU Kota Makassar kebanyakan dilakukan dengan menonton video dan pemberian materi serta tanya jawab untuk prakteknya tidak bisa dilaksanakan secara langsung karena KPU Kota Makassar masih belum bisa memberikan fasilitas tersebut.”

Selain itu mengenai masyarakatnya sendiri sebahagian masyarakatnya masih ada yang belum terbuka masalah pendidikan politik seperti pernyataan dari bapak RT 01 di Kelurahan Ende:

“Warga di daerah ende kebanyakan warga keturunan China sehingga ketika ada kegiatan pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Pihak KPU di daerah kecamatan wajo terkadang ada saja masyarakat setempat yang menolak, bahkan tidak sering masyarakat di sana yang menolak ketika ada pelaksanaan sosialisasi dikarenakan di daerah kecamatan ende adalah daerah yang warganya cukup sibuk akan pekerjaannya sehingga susah untuk pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh.”

Maka dari itu untuk Program RPP sendiri belum bisa dikatakan efektif secara menyeluruh dikarenakan masyarakatnya sendiri masih belum mau untuk menerima ketika pihak KPU ingin menyelenggarakan sosialisasi mengenai pendidikan politik.

Kinerja Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Politik

Mengenai kinerja Rumah Pintar Pemilu setelah di resmikan pada tahun 2016 maka KPU kota makassar langsung bergerak melaksanakan kegiatan program RPP. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh setiap RPP di KPU Kabupaten/Kota yang ada bersumber dari penganggaran KPU RI selanjutnya untuk didistribusikan kesetiap anggaran KPU Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan kegiatan di sekretariat KPU di daerah maka kegiatan tadi dapat dilihat dalam bentuk Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Petunjuk Operasional Kegiatan atau disingkat POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Rencana kerja dan biaya yang diperlukan disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai

penjabaran lebih lanjut dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Pada kegiatan RPP di setiap KPU Kabupaten/Kota mengikuti dari penentuan yang dilakukan KPU.

Mengenai kinerja RPP sendiri dalam meningkatkan partisipasi melalui pendidikan politik di Kota Makassar sudah banyak kegiatan yang dilakukan mulai dari memperkenalkan, memberi pemahaman, dan menanamkan kesadaran akan pentingnya demokrasi. Menurut pengamatan Penulis di lapangan untuk pihak KPU sudah melakukan berbagai macam upaya mulai dari digitalisasi sampai ke kegiatan langsung melalui Proram RPP akan tetapi untuk bangunan Rumah Pintar Pemilu sampai saat ini masih belum ada dan untuk pemandu RPP sendiri belum ada yang tetap. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa pada tahun 2019 permasalahan yang terjadi juga mengenai pemandu dari fasilitas ruang visual RPP yang belum maksimal sehingga masyarakat ketika masuk ke ruang visual RPP tidak ada yang menjelaskan terkait apa saja yang ada di dalam ruang tersebut. Untuk KPU Kota Makassar sendiri bahkan untuk ruang visual saja belum tersedia. Akan tetapi mengenai kegiatan program RPP sendiri sudah banyak yang terealisasi walaupun hingga saat ini pihak KPU Kota Makassar juga masih menunggu untuk perealisasi ruang visual yang ditargetkan akan dibangun pada tahun 2022.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai efektivitas dan kinerja dari program Rumah Pintar Pemilu yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah Kinerja RPP (Rumah Pintar Pemilu) di KPU Kota Makassar telah berjalan dengan baik, Rumah Pintar Pemilu ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan politik sejak dini,

dengan target sasaran yang utama adalah kelompok pemilih strategis seperti pemilih pemula, perempuan, marginal dan penyandang disabilitas serta agamawan dan kelompok pra pemilih yaitu kelompok yang belum memasuki usia pemilih. Sosialisasi merupakan metode yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar untuk menarik perhatian masyarakat terkait program Rumah Pintar Pemilu baik secara luring maupun melalui sosial media maupun website. Namun seiring berjalannya program tersebut KPU Kota Makassar terus melakukan pemantauan untuk mengevaluasi kekurangan kekurangan yang ada, agar output yang dihasilkan dari program Rumah Pintar Pemilu dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Al Rafni, S. (2019). The Development of Election Smart House as a Tool of Political Education Based on Local Wisdom. *Sosial Dan Pembangunan* .
- Creswell, jhonw. (2016). *Research Desain (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran)*. 245.
- Dewi, L. A. (2021). Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan Di KPU Kabupaten Banyumas Prespektif Masalah Mursalah.
- Earl R. Babbie. (2010). *The Practice of Social Research* (12th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Endraswara, S. (2006). *Metode , Teori, Teknik penelitian kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Hermawan, S. S. (2018). *Memangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Irtanto.(2008). *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Kabupaten Soppeng (Studi Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat). *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Komaruddin. (2005). *Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia*.24.Koentjaraningrat. (1993).*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Julia. (2010). Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kecamatan Pasanggrahan Kotamadia Jakarta Selatan. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*., 26.
- Muhrani. (2018). Sao Macca Di Makassar Dalam Angka 2020. (2020). From <https://makassarkota.bps.go.id/publication/2019/09/27/fecef38706d8f12e1bc1a216/kecamatan-makassar-dalam-angka-2019.html>.
- Makassar, K. K. (2021, Maret 17). *10 Kelurahan Dengan Partisipasi Terendah Pada Pilwali 2020*. Dipetik Agustus 26, 2021, dari KPU Kota Makassar:<https://kota-makassar.kpu.go.id/web/5284/10-kelurahan-dengan-partisipasi-masyarakat-tertinggi-pada-pilwali-makassar-2020/>
- Nashar. (2020). *Kualitas Pelayanan A k a n Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Biro Teknis dan Hupmas, B. B. (2015). *Pedoman Rumah Pintar Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Reza, A. M. (2020). Strategi KPU Kota Sukabumi Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019. *Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.

- Rusadi, K. (2004). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sanusi, M. (2020, Desember 21). *Partisipasi Pemilih Di Pangkep Tertinggi, Makassar Terendah*. Dipetik Agustus 31, 2021, dari Makassar Sindonews: [https://makassar.sindonews.com/read/275442/710/partisipasi-\(makassar-dalam-angka-2020,-2020\)-\(makassar-dalam-angka-2020,-2020\)-pemilih-di-pangkep-tertinggi-makassar-terendah-1608527573/10](https://makassar.sindonews.com/read/275442/710/partisipasi-(makassar-dalam-angka-2020,-2020)-(makassar-dalam-angka-2020,-2020)-pemilih-di-pangkep-tertinggi-makassar-terendah-1608527573/10)
- Suhartono, E. (2020, January 16). *Mensukseskan Pemilihan Melalui Rumah Pintar Pemilu*. Dipetik September 1, 2021, dari KPUD Medan Kota: <https://kpud.medankota.go.id/mendidik-pemilih-mensukseskan-pemilihan-melalui-rumah-pintar-pemilu/more>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Vanderstoep, S. a. (2009) *Research Methods For Everyday Life Blending Qualitative and Quantitative Approaches*. San Francisco: Jossey- Bass
- Yusriati, A. (2020). Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Di Kabupaten Deli Serdang.
- Zega, M. M. (2019). Pengaruh Program RPP Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor KPU Kota Medan .